

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM
PENANGGULANGAN JURU PARKIR LIAR



Diajukan Oleh:

TIMOTHY VITO SANTOSO
NIM. 21102113130121

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI, 2026

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM
PENANGGULANGAN JURU PARKIR LIAR



Diajukan Oleh:

TIMOTHY VITO SANTOSO
NIM. 21102113130121

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI, 2026

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM
PENANGGULANGAN JURU PARKIR LIAR**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

TIMOTHY VITO SANTOSO
NIM. 21102113130121

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JULI, 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM PENANGGULANGAN JURU PARKIR LIAR

Diajukan Oleh:

TIMOTHY VITO SANTOSO

NIM. 21102113130121

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari jumat 2 Januari 2026 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



M. Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 196504221995121001

Diketahui,

Banjarmasin, 21 juli 2026

Ketua Program,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM
PENANGGULANGAN JURU PARKIR LIAR

Diajukan Oleh:

TIMOTHY VITO SANTOSO

NIM. 21102113130121

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

234/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal

28 JUL 2026

Disahkan,

Dekan



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal ,29 Juni 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

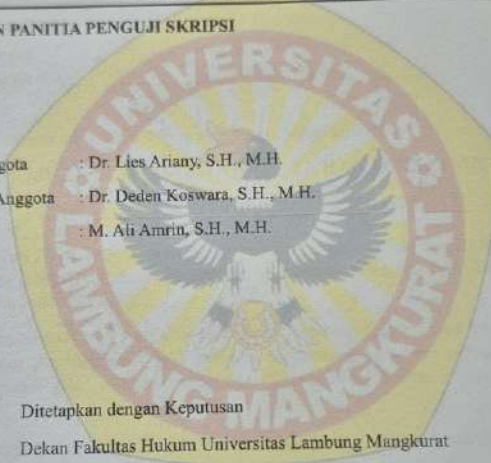
Ketua/Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Sekretaris Anggota : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 788/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 Juni 2026



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TIMOTHY VITO SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 21102113130121
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN DALAM PENANGGULANGAN JURU PARKIR LIAR

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



TIMOTHY VITO SANTOSO

NIM. 21102113130121

MOTO

"Don't say you can't before you try, jangan katakan tidak bisa sebelum mencoba, jatuh itu biasa berani bangkit itu luar biasa"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, dan material tanpa henti.
3. Keluarga besar, yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Dosen pembimbing dan dosen penguji, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah membantu, mendukung, dan menemani selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Almamater tercinta, sebagai tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga.

TIMOTHY VITO SANTOSO, Januari 2026. **PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI JURU PARKIR LIAR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

RINGKASAN

Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan perdagangan yang sangat dinamis. Sebagai kota metropolitan yang menjadi poros aktivitas masyarakat Kalimantan Selatan, Banjarmasin mengalami perkembangan yang pesat baik dalam sektor infrastruktur, jasa, maupun perdagangan. Aktivitas masyarakat yang tinggi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap sarana transportasi yang memadai, termasuk fasilitas parkir yang layak dan tertata. Ketersediaan tempat parkir yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran lalu lintas serta kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial sehari-hari.

Fenomena juru parkir liar juga mencerminkan lemahnya efektivitas regulasi dan sistem pengawasan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan perparkiran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antar Pemerintah Kota Banjarmasin sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan perparkiran, yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam peraturan tersebut diatur secara rinci mengenai tata kelola perparkiran, mekanisme retribusi daerah, serta kewenangan pengawasan oleh Dinas Perhubungan.

Bahwa permasalahan parkir liar di Kota Banjarmasin merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tata kelola perkotaan, dan kesejahteraan masyarakat. Parkir liar tidak hanya menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan publik, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial masyarakat perkotaan yang berupaya bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan kerja formal.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah berupaya melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menanggulangi praktik parkir liar melalui penerapan regulasi, pengawasan, serta pembinaan terhadap masyarakat. Dasar hukum yang digunakan antara lain Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Wali Kota Pasal 9 ayat (23) dan Peraturan Wali Kota Pasal 133 ayat (23). Regulasi tersebut secara normatif sudah cukup memadai, namun efektivitas implementasinya belum optimal di lapangan.

Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami masalah yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Penulis menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari data tidak langsung untuk menganalisis masalah hukumnya.

TIMOTHY VITO SANTOSO. Januari 2026. **PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI JURU PARKIR LIAR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan juru parkir liar di Kota Banjarmasin. Untuk menganalisis efektivitas kebijakan dan peraturan daerah dalam menanggulangi juru parkir liar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berarti menggambarkan subjek dan objek melalui data dan sampel dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan analisis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Bahwa permasalahan parkir liar di Kota Banjarmasin merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tata kelola perkotaan, dan kesejahteraan masyarakat. Parkir liar tidak hanya menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan publik, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial masyarakat perkotaan yang berupaya bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan kerja formal. Kedua, Pemerintah Kota Banjarmasin telah berupaya melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menanggulangi praktik parkir liar melalui penerapan regulasi, pengawasan, serta pembinaan terhadap masyarakat. Dasar hukum yang digunakan antara lain Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Wali Kota Pasal 9 ayat (23) dan Peraturan Wali Kota Pasal 133 ayat (23). Regulasi tersebut secara normatif sudah cukup memadai, namun efektivitas implementasinya belum optimal di lapangan.

Kata Kunci (Keywords): Peraturan Pemerintah, Kebijakan Publik, Parkir Liar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses. Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana adalah menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak/Ibu Dosen Penguji, atas kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf akademik, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Kedua orang tua dan keluarga penulis, atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak ternilai.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang memberikan dukungan, dorongan, dan pendampingan selama proses penulisan Skripsi ini.

Penulis mengakui masih terdapat permasalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun. Semoga para pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan materi dalam skripsi ini dapat memperoleh manfaat.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori Peran Pemerintah	10
2. Teori Penegakan Hukum	14
3. Teori Efektivitas Kebijakan Publik	18
4. Keterkaitan Antar Teori	22
B. Landasan Hukum	23

BAB III.....	24
METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sifat Penelitian.....	24
C. Pendekatan Penelitian.....	24
D. Lokasi Penelitian.....	25
E. Jenis dan Sumber Data.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26
H. Pengolahan dan Penyajian Data.....	26
I. Teknik Analisa Data.....	26
BAB IV.....	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
BAB V.....	37
PENUTUP.....	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN.....	43
RIWAYAT HIDUP.....	45